

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk laporan Tahun 2019. Penelitian ini mengenai analisis penerapan akuntansi investasi dalam penyesuaiannya dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.06 dalam PP No 71 Tahun 2010 serta ketentuan peraturan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akuntansi investasi sehubungan dengan pelaporan, pengakuan, dan pengukuran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama tahun 2018 sampai 2019, maka dalam melakukan observasi peneliti menggunakan metode wawancara secara intensif dengan pihak internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam hal ini pihak Kepala Badan Keuangan dan Aset serta tenaga fungsional yang menyelenggarakan fungsi akuntansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran, pelaporan, dan pengakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian melakukan dokumentasi terhadap dokumen – dokumen yang menunjang hasil wawancara pihak-pihak terkait diantaranya Laporan Keuangan Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Struktur organisasi, tugas serta dokumen informasi fungsi pokok Badan Keuangan dan Aset dalam Pemerintahan Kota Kupang”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data nilai investasi permanen tahun 2018 dan 2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Nilai Investasi Permanen Kota Kupang (Penyertaan Modal)
Periode Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2018	Berkurang	Bertambah Penyertaan Tahun 2019	Saldo Penyertaan 31 Des 2019
1	Penyertaan Modal – Bank NTT	87.050.000.000,00	-	-	87.050.000.000,00
2	Penyertaan Modal – KPN Maju	15.803.072.551,00	2.249.145.897,00	-	13.553.926.654,00
3	Penyertaan Modal – PD Pasar	8.691.315.309,00	6.725.019.274,00	259.915.069,00	2.226.211.104,00
4	PDAM Kota Kupang	35.304.555.512,00	303.672.597,00	-	35.000.882.915,00
5	BUMD PT. Sasando	1.437.533.766,00	630.029.201,00	-	807.504.565,00
	Jumlah	148.286.477.138,00	9.907.866.969,00	259.915.069,00	138.638.525.238,00

Sumber : Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2019 melakukan investasi (penyertaan modal) jangka panjang permanen sebesar Rp. 138.638.525.238,00. Jumlah ini menunjukkan penurunan nilai investasi dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 148.286.477.138,00. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian pada KPN Maju, PD Pasar, PDAM Kota Kupang dan PT. Sasando sebesar Rp.9.907.866.969,00. Namun di tahun yang sama (2019) PD Pasar mengalami kenaikan nilai investasi sebesar Rp.259.915.069,00. kerugian ini terjadi dikarenakan laporan keuangan yang belum maksimal dengan standar SAP PP No 71 tahun 2010 khususnya PSAP No 6 tentang akuntansi investasi.

Berdasarkan data pada tabel diatas maka diasumsikan bahwa kinerja investasi pemerintah daerah kota kupang terhadap instansi-instansi yang

mendapatkan penyertaan mengalami kerugian secara signifikan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi untuk setiap instansi yang mendapatkan penyertaan modal belum sesuai PSAP No 6 Tahun 2016. Laporan keuangan yang diminta oleh peneliti nyatanya belum secara sehingga, kondisi ini secara tidak langsung juga dapat dikatakan menjadi penyebab atas kurang optimalnya investasi jangka panjang pada Pemerintah Kota Kupang tidak memberikan hasil yang optimal dikarenakan dari segi pelaporan sudah tidak memadai sehingga pelaksanaan proyeksi atas investasi dan proyeksi peningkatan pendapatan untuk menunjang peningkatan nilai investasi juga tidak terimplementasi secara efektif.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Unsur pengakuan investasi jangka panjang permanen diatur dalam PSAP 06 Tahun 2016. Dalam Paragraf 19 PSAP 06 tentang Pengakuan Investasi menyebutkan bahwa Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal (reliable).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, pengakuan awal pada investasi jangka panjang permanen oleh Pemerintah Kota Kupang berpedoman pada PSAP No 06 tahun 2016 tentang akuntansi investasi. Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2019 melakukan realisasi penyertaan modal sebagai pengeluaran pembiayaan kepada BUMD Kota Kupang. Berikut adalah informasi mengenai penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019.

Tabel 5.2
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Kupang
Tahun 2019

No	BUMD Kota Kupang	Berkurang Penyertaan Modal (Investasi) Jangka Panjang Permanen Tahun 2019	Bertambah Penyertaan Modal (Investasi) Jangka Panjang Permanen Tahun 2019
1	Bank NTT	-	
2	KPN Maju	Rp 2.249.145.897	
3	PD Pasar	Rp 6.725.019.274	Rp 259.915.069
4	PDAM Kota Kupang	Rp 303.762.597	
5	PT. Sasando	Rp 630.029.201	

Sumber : Pengolahan oleh peneliti atas Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas terjadinya pengurangan saldo penyertaan modal Pemda Kota Kupang pada BUMD Kota Kupang pada tahun 2019, KPN Maju sebesar Rp 2.249.145.897, PDAM Kota Kupang sebesar Rp 303.762.597 dan PT. Sasando sebesar Rp 630.029.201, dan sedangkan PD Pasar mengalami penambahan dan pengurangan saldo penyertaan modal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kondisi ini dikarenakan koreksi

ekuitas pada skema pencatatan, aset tetap dicatat secara berulang (bangunan pasar tercatat di PD Pasar dan perindag) sebesar Rp 6.725.019.274, dan Penambahan saldo penyertaan modal sebesar Rp 259.915.069.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan yakni Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Pak Yohanis Efsan Padabain, SE selaku staf Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang bahwa:

“Pengakuan awal terhadap investasi menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Contoh pada Bank NTT kebijakan akuntansi menggunakan metode biaya yang artinya perusahaan mengalami rugi atau laba tetap sebesar investasi tidak pernah berkurang, dan juga hampir semua BUMD Kota Kupang setiap tahunnya mengalami kerugian. Untuk pengakuan awal khususnya dalam penjurnalan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang dibuat dengan sederhana dan belum mengikuti aturan yang ada.”

Dari tidak adanya jurnal pengakuan awal khususnya dalam penjurnalan pada badan pengelolahan keuangan daerah pemerintah kota kupang dan efeknya terhadap aset daerah kota kupang sehingga menimbulkan laporan keuangan yang kurang efektifitas serta laporan keuangan yang kurang memadai terhadap pemerintah kota kupang.

5.2.2 Pengukuran Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Pengukuran pada Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam

rangka perolehan investasi berkenan. Artinya adalah sebesar pengeluaran kas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang merupakan dasar pengukuran investasi jangka panjang, khususnya penyertaan modal. berikut data penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Kupang kepada BUMD Kota Kupang tahun 2019 :

Tabel 5.3
Jumlah Investasi Penyertaan Modal Jangka Panjang Permanen
Tahun 2019

No	BUMD Kota Kupang	Berkurang Penyertaan Modal (Investasi) Jangka Panjang Permanen Tahun 2019	Bertambah Penyertaan Modal (Investasi) Jangka Panjang Permanen Tahun 2019
1	Bank NTT	-	
2	KPN Maju	Rp 2.249.145.897	
3	PD Pasar	Rp 6.725.019.274	Rp 259.915.069
4	PDAM Kota Kupang	Rp 303.762.597	
5	PT. Sasando	Rp 630.029.201	
	Jumlah	9.907.866.969,00	Rp 259.915.069

Sumber : Pengolahan oleh peneliti atas Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2019 merealisasikan penyertaan modal (investasi) jangka panjang permanen sebagai pengeluaran pembiayaan kepada BUMD Kota Kupang sebesar Rp 259.915.069 dimana hanya PD Pasar yang mengalami penambahan saldo penyertaan modal, namun PD Pasar juga mengalami penurunan diakibatkan koreksi ekuitas karena Aset Tetap dicatat secara berulang (bangunan pasar tercatat di PD Pasar dan perindag) sebesar Rp 6.725.019.274. Sedangkan pengurangan penyertaan modal juga terjadi pada KPN Maju sebesar Rp 2.249.145.897, PDAM Kota sebesar Rp. 303.762.597, PT Sasando sebesar Rp 630.029.201.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengukuran investasi jangka panjang permanen pada pemerintah kota kupang tahun 2019 tidak sesuai dengan PSAP No 06 tahun 2016 mengenai pelaporan investasi. Diantaranya tidak ada informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kembali pembiayaan investasi kepada BUMD Kota kupang pada laporan realisasi anggaran pemerintah kota kupang tahun anggaran 2018 yang dapat dilihat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Kupang tahun 2019, maka pemerintah kota kupang mengalami kerugian serta tidak dapat memberikan hasil yang optimal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari segi pelaporan.

Pembuktian ketidaksesuaian pengukuran investasi yang dilakukan pemerintah kota kupang dengan PSAP No 06 tahun 2016 juga dapat dilihat pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Kupang, dimana tidak adanya informasi mengenai beban awal penyertaan modal pemerintah kota kupang kepada BUMD pada tahun 2019. Berikut adalah informasi mengenai beban kerugian pada laporan operasional (LO) :

Tabel 5.4
Beban Penyertaan Modal Kota Kupang Tahun 2019

No	Jenis beban	Jumlah
1	Beban Pegawai	Rp 535.543.899.717,00
2	Beban Persediaan	Rp 88.775.467.854,61
3	Beban Barang dan Jasa	Rp 223.751.744.533,43
4	Beban Pemeliharaan	Rp 3.007.199.889,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 55.407.836.830,00
6	Beban Bunga	-

7	Beban Subsidi	-
8	Beban Hibah	Rp 34.664.882.316,60
9	Beban Bantuan Sosial	Rp 14.621.609.082,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 137.097.174.176,71
11	Beban Penyisihan Piutang	Rp 5.456.561.143,56
12	Beban Transfer	Rp 8.944.386.451,00
13	Beban Lain-lain	Rp 3.182.847.695,00
14	Beban Tak Terduga	-
	Jumlah Beban	Rp 1.110.453.609.688,91

Sumber : Pengolahan oleh peneliti atas Laporan Operasional Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.4 informasi jumlah beban sebesar Rp 1.110.453.609.688,91 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 535.543.899.717, Beban Persediaan sebesar Rp 88.775.467.854,61, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 223.751.744.533,43, Beban Pemeliharaan sebesar Rp 3.007.199.889,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 55.407.836.830,00, Beban Hibah sebesar Rp 34.664.882.316,60, Beban Bantuan Sosial sebesar Rp 14.621.609.082,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 14.621.609.082,00, Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp 5.456.561.143,56, Beban Transfer sebesar Rp 8.944.386.451,00, Beban lain-lain Rp 3.182.847.695,00 merupakan kerugian yang dialami oleh KPN Maju, PDAM Kota Kupang, dan PT. Sasando. Sedangkan informasi mengenai penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Kupang pada BUMD Kota Kupang tidak dilaporkan pada Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2019.

Kondisi di atas didukung dengan asumsi dari narasumber dari wawancara yang dilakukan dengan Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. yakni Bapak Yohanis Efsan Padabain, SE selaku staf Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang mengasumsikan bahwa :

“Pengukuran investasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang menggunakan analisis – analisis rasio. Hanya dalam penerapannya harus melalui kajian – kajian yang akademis yang kuat karena yang selama ini terjadi adanya kesalahan kegiatan pengukuran diakibatkan lemahnya pengetahuan para staf mengenai aturan PSAP No 06 tahun 2016 tentang akuntansi investasi, sehingga menyebabkan kesalahan pada kegiatan pengukuran investasi yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan. ”

5.2.3 Pelaporan dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Pengungkapan Akuntansi investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang. Di samping itu, investasi jangka panjang Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019 telah diungkapkan dengan kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan akuntansi investasi dan informasi mengenai penyertaan modal kepada BUMD. dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai investasi jangka panjang permanen pada Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019 terdapat penambahan penambahan saldo penyertaan modal pada PD Pasar. Namun juga terjadi pengurangan saldo penyertaan modal pada PD Pasar dikarenakan koreksi ekuitas karena, aset tetap dicatat secara berulang (bangunan pasar tercatat di PD Pasar dan

perindag), dan pengurangan pada KPN Maju, PDAM Kota Kupang, dan PT. Sasando akibat kerugian.

Berikut merupakan penyajian informasi mengenai laporan penyertaan modal investasi jangka panjang permanen pemerintah kota kupang pada laporan catatan atas laporan keuangan tahun 2019:

Tabel 5.5
Nilai Investasi Permanen Kabupaten Kupang(Penyertaan Modal)
Periode Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2018	Berkurang	Bertambah Penyertaan Tahun 2019	Saldo Penyertaan 31 Des 2019
1	Penyertaan Modal – Bank NTT	87.050.000.000,00			87.050.000.000,00
2	Penyertaan Modal – KPN Maju	15.803.072.551,00	2.249.145.897,00		13.553.926.654,00
3	Penyertaan Modal – PD Pasar	8.691.315.309,00	6.725.019.274,00	259.915.069,00	2.226.211.104,00
4	PDAM Kota Kupang	35.304.555.512,00	303.672.597,00		35.000.882.915,00
5	BUMD PT. Sasando	1.437.533.766,00	630.029.201,00		807.504.565,00
	Jumlah	148.286.477.138,00	9.907.866.969,00	259.915.069,00	138.638.525.238,00

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Perhitungan nilai kepemilikan investasi /penyertaan modal pada bank NTT menggunakan biaya (cost method), sedangkan KPN Maju, PD Pasar, PDAM Kota Kupang, PT. Sasando menggunakan metode ekuitas (equity method) karena 100% kepemilikan adalah milik pemerintah kota kupang. Penyertaan modal kota kupang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal Pada Bank NTT

- Nilai penyertaan modal Pemda Kota Kupang pada Bank NTT sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 87.050.000.000,00 sama dengan Tahun 2018
- b. Nilai penyertaan modal PEMDA Kota Kupang pada KPN Maju sampai tahun 2019 sebesar Rp. 14.713.764.161 ,00 sedangkan sampai tahun 2018 sebesar Rp.15.803.072.551,00 . dari angka di atas terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp. 1.089.308.390,00
 - c. PD Pasar : nilai penyertaan modal PEMDA Kota Kupang pada PD Pasar sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.2.226.221.104,00 sedangkan sampai pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.691.315.309,00 dari angka tersebut terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp. 6.725.091.274,00 dikarenakan koreksi ekuitas karena, aset tetap dicatat secara berulang (bangunan pasar tercatat di PD Pasar dan perindag), dan ada kenaikan ekuitas sebesar Rp. 259.915.069,00
 - d. PDAM Kota Kupang : Nilai penyertaan modal Pemda Kota Kupang pada PDAM Kota Kupang sampai dengan 2019 sebesar Rp. 35.000.882.915,00 sedangkan sampai pada tahun 2018 sebesar Rp. 35.304.555.512,00 dari angka tersebut terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp. 303.672.597,00
 - e. PT. Sasando: nilai penyertaan pada PT.Sasando sampai tahun 2019 sebesar Rp. 807.504.565,00 dan sampai 2018 sebesar Rp. 1.437.533.766,00 terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp. 630.029.201,00

Dari tabel 5.4 di atas, dijelaskan bahwa penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kota Kupang tahun 2019 sebesar Rp 138.638.525.238,00 yang terdiri dari Bank NTT sebesar Rp 87.050.000.000,00, KPN Maju sebesar Rp 13.553.926.654,00, PD Pasar sebesar Rp 2.226.211.104,00, PDAM kota Kupang sebesar Rp 35.000.882.915,00, dan PT. Sasando sebesar Rp 807.504.565,00. Perhitungan Nilai penyertaan modal pada Bank NTT menggunakan metode biaya (*cost method*), sedangkan KPN Maju, PD Pasar, PDAM Kota Kupang, dan PT. Sasando menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Pada hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber selaku staf akuntansi pada Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tentang Investasi jangka Panjang Permanen, Bapak Yohanis Efsan Padabain, SE mengatakan bahwa:

“pelaporan didasarkan dari laporan keuangan BUMD dan dibuatkan dalam konsolidasi sebagai laporan keuangan Pemerintah Daerah lalu diserahkan ke BPK untuk diaudit untuk nantinya menjadi pertanggungjawaban kepada DPR dan dievaluasi ke pemerintah provinsi. Mengenai penyajian pelaporan/pengungkapan tentunya sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai dan telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan neraca.”

Berikut merupakan informasi penyajian pelaporan penyertaan modal pada Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kota Kupang tahun 2019:

Tabel 5.6
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen
Tahun 2018 dan 2019

Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019
148.286.477.138,00	138.638.525.238,00

Sumber : Pengolahan oleh peneliti atas Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Dari tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2018 sebesar Rp 148.286.477.138,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 138.638.525.238,00. Terjadinya penurunan nilai penyertaan modal pada Pemerintah Kota Kupang dikarenakan kerugian yang dialami oleh BUMD Kota Kupang, namun dari informasi diatas dapat dikatakan Pemerintah Kota Kupang sudah melakukan penyajian pelaporan/pengungkapan mengenai nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan Neraca Tahun 2019.

**5.3 Rangkuman Penjelasan PSAP No 06 Tahun 2016 yang Diterapkan
Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019**

**Tabel 5.7
Rangkuman Penjelasan PSAP No 06 Tahun 2016 yang Diterapkan
Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019**

No	PSAP No 06 Tahun 2016 (Akuntansi Investasi)	Penerapan Pemerintah Kota Kupang terhadap PSAP No 06 Tahun 2016	Sesuai /Tidak
1	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Pemerintah daerah memiliki potensi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau jasa potensi dimasa mendatang dengan tingkat yang memadai oleh karena itu pemerintah daerah harus menilai tingkat manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensi dimasa depan berdasarkan bukti-bukti yang ada saat pengakuan pertama kali.</p> <p>b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.</p>	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Tidak adanya informasi mengenai bukti pengakuan awal penyertaan modal yang disusun atau dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang menyebabkan ketidakpastian dalam penilaian manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah Pemerintah Kota Kupang akan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial dari investasi tersebut.</p> <p>c. Tidak ditemukan bukti berupa transaksi dalam bentuk jurnal pengakuan awal sehingga Pemerintah Kota Kupang tidak dapat mengukur nilai perolehan investasi secara memadai/andal (reliable)</p>	<p>Tidak Sesuai dengan PSAP No 06 Tahun 2016</p>
2	<p>Pengukuran Investasi</p> <p>Investasi jangka panjang yang bersifat permanen didokumentasikan dengan jumlah yang sama dengan biaya perolehannya. Ini mencakup biaya transaksi</p>	<p>Pengukuran Investasi</p> <p>Informasi tentang pengeluaran pembiayaan dan pengembalian investasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Kupang tidak tercantum dalam Laporan Operasional (LO) dan</p>	<p>Tidak Sesuai dengan PSAP No 06 Tahun 2016</p>

	investasi berserta biaya lain yang muncul selama proses perolehan investasi tersebut.	tidak ada laporan awal mengenai biaya penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang.	
3	<p>Pelaporan/Pengungkapan Investasi</p> <p>Menerut PSAP No.06 Tahun 2016, Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Perubahan pos investasi 	<p>Pelaporan/Pengungkapan Investasi</p> <p>Tidak ada informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kembali pembiayaan investasi kepada BUMD kota kupang maka Pemerintah Kota Kupang mengalami kerugian serta tidak dapat memberikan hasil yang optimal.</p>	<p>Tidak Sesuai dengan PSAP No 06 Tahun 2016</p>